

ANALISIS FAKTOR KEGAGALAN PENGELOLAAN KOPERASI DI KABUPATEN PATI

Rahmadi¹

STIE Semarang

email: rahmadibs65@gmail.com

Abstract. *This study aims to (1) Describe the development of cooperatives in Pati, Central Java Province (2) Describe the impact of the failure of cooperative management in Pati Regency. (3) Ensuring that any Cooperative problems in Pati Regency can be faced and resolved so that the percentage of cooperatives that are dissolved is getting smaller.*

The method used in this research is a qualitative method of case study research. The technique used in data collection is done through participatory observation, interviews, and documentation by using data analysis that is carried out continuously from the beginning to the end of the study starting from collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: (1) Cooperatives in Pati Regency in 2017 were 1,143 cooperatives, 594 were active (51.97%), 549 were active (48.03%). (2) The consequences of the failure of cooperative management in Pati Regency, several cooperatives that were dissolved by the Cooperative Office and Regency UMKM, in 2018 a number of 527 cooperative units were dissolved. (3) Cooperative management in Pati Regency, some running well and smoothly, cooperatives that are active / well managed 29.38%, some others run poorly and not smoothly, cooperatives are not well managed / regular 21.68%

Keywords: cooperative, management, failure, dissolution.

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan perkembangan koperasi di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah (2) Mendeskripsikan dampak dari adanya kegagalan pengelolaan koperasi di Kabupaten Pati. (3) Memastikan bahwa setiap permasalahan Koperasi di kabupaten Pati, dapat dihadapi dan diselesaikan sehingga prosentase koperasi yang dibubarkan semakin kecil.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis penelitian studi kasus. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data yang dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian mulai dari mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Koperasi di Kabupaten Pati tahun 2017 sejumlah 1.143 koperasi, aktif sejumlah 594 koperasi (51,97%), tidak aktif 549 koperasi (48,03%). (2) Konsekwensi dari kegagalan pengelolaan koperasi di Kabupaten Pati,

beberapa koperasi yang dibubarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten, tahun 2018 sejumlah 527 Unit koperasi dibubarkan. (3) Pengelolaan koperasi di Kabupaten Pati, sebagian berjalan dengan baik dan lancar, koperasi yang aktif / dikelola dengan baik 29,38 %, sebagian lagi berjalan dengan tidak baik dan tidak lancar, koperasi tidak dikelola secara baik/regular 21,68%

Kata kunci : koperasi, pengelolaan, kegagalan, pembubaran.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendirian Koperasi bermula dari fenomena perekonomian kapitalistis saat itu dimana para penggerak ekonomi yang tidak memiliki dana besar merasa sulit menghadapi para pengusaha besar saat harus bersaing di dunia usaha sehingga kesenjangan ekonomi semakin terasa. Kesenjangan ekonomi tersebut menimbulkan kesadaran bahwa permasalahan kemiskinan yang terjadi saat itu tidak dapat dipecahkan tanpa adanya kesatuan dan kerjasama di antara para pelaku ekonomi yang bermodal minim (Masngudi 1990). Tak heran bahwa pendirian Koperasi yang memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk bersama-sama mengumpulkan dananya dan menjalankan usahanya melalui badan usaha tersebut, dianggap menjadi sarana untuk mengatasi kelemahan dan kepincangan dari sistem perekonomian yang kapitalistis (Team UGM 1984).

Koperasi adalah bentuk badan usaha yang didirikan beberapa orang atau beberapa badan hukum koperasi sebagai anggota, mereka bekerja sama atas dasar sukarela dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan

barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Pengertian koperasi Indonesia, Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan, “bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari pengertian koperasi di atas, dapat disimpulkan koperasi adalah suatu cara yang dilakukan sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membentuk usaha bersama, modal yang terbatas dan tanggung jawab pengelolaannya dengan tanpa pemaksaan dari manapun dan tidak disertai mencari keuntungan untuk perorangan, badan atau organisasi. Sehingga usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan, kemampuan untuk mempertahankan diri dari kesulitan.

Setiap organisasi memerlukan tata laksana pengelolaan yang baik dan rapi

agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuannya. Pengertiannya pengelolaan di sini adalah sama dengan pengertian yang dikandung kata manajemen dari bahasa Inggris. Yang dimaksud dengan manajemen adalah seluk-beluk usaha yang dijalankan oleh perusahaan koperasi dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada, yang dilakukan oleh personil yang dipekerjakan dibawah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, evaluasi dari pengurus koperasi yang bersangkutan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan mempergunakan tenaga yang ada. Sebagaimana dalam perundangan yang ada untuk keperluan itu, koperasi dapat menjalankan ketatalaksanaan karena ia memiliki seperangkat peralatan organisasi, yaitu rapat anggota, pengurus, badan pemeriksa, dan pelaksana usaha.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian

Pengertian koperasi secara sederhana berawal dari kata "co" yang berarti bersama

dan "operation" artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah kerja sama. Sedangkan pengertian lain Koperasi yaitu suatu organisasi yang terdiri dari kumpulan orang dengan kepentingan ekonomi yang sama dimana orang-orang tersebut berupaya memenuhi kepentingannya melalui kerjasama mereka dalam mengelola dan mengawasi organisasinya sehingga perusahaan / organisasinya dapat memberikan pelayanan ekonomi kepada orang-orang tersebut (Maelani 2011). Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta; 1954).

Menurut ILO (1966) koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta

menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (dikutip dari Edilius & Sudarsono; 1993). Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Koperasi dikenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1986. Pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Pada tanggal 12 Juni 1947 kemudian ditetapkan sebagai

hari koperasi Indonesia. Keberadaan Koperasi di Indonesia saat itu mengalami pasang surut dan pada akhirnya mereka berhasil menyelenggarakan Kongres Koperasi untuk pertama kali pada tanggal 12 Juli 1947 sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada Kongres Koperasi pertama itulah disepakati pula bahwa azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong (Hadikusuma 2001).

Manajemen

G. Terry mendefinisikan bahwa; “Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan”. Menurut Amirullah (2001) manajemen pada umumnya dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Di dalam mengelola sebuah koperasi diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif

dan efisien yang dikenal dengan manajemen. A.H. Gopnar mengatakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dan tiga sudut pandang, yaitu; organisasi, proses, dan gaya (Hendar dan Kusnadi; 1999). Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dan tiga unsur: anggota, pengurus, dan karyawan. Dapat dibedakan struktur atau alat perlengkapan organisasi yang sepintas adalah sama yaitu: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Dan sudut pandang proses, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Ditinjau dan sudut pandang gaya manajemen (*management style*), manajemen koperasi menganut gaya partisipatif (*participation management*), di mana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dan manajemen yang aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaannya.

Watak manajemen koperasi ialah gaya manajemen partisipatif. Pola umum manajemen koperasi yang partisipatif tersebut menggambarkan adanya interaksi antar unsur manajemen koperasi. Terdapat pembagian tugas (*job description*) pada masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur manajemen

mempunyai lingkup keputusan (*decision area*) yang berbeda, kendatipun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (*shared decision areas*).

Faktor penghambat sistem ekonomi koperasi yaitu:

1. Faktor Internal, meliputi tingkat pendidikan pengurus dan anggota umumnya masih rendah, keterampilan dan keahlian anggota masih terbatas, banyak anggota koperasi yang tidak mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.
2. Faktor Eksternal, meliputi kurangnya dukungan dari pemerintah dalam hal pelayanan, fasilitas dan penyuluhan, banyak badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi, masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai koperasi, kebijakan dan program kerja koperasi masih cenderung timbul dari prakarsa pemerintah, koperasi sulit mendapatkan kredit dari bank, karena persyaratan yang sulit terpenuhi, kurangnya petugas pembina koperasi, baik jumlahnya maupun mutunya, koperasi juga

terhambat karena kurang kerjasama di bidang ekonomi.

Sedangkan, faktor penyebab kegagalan sistem perekonomian Indonesia yaitu:

1. Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi. Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
2. Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Bertahun-tahun telah bergulir sejak tahun 1947, perkembangan Koperasi di Indonesia dapat dianggap cukup pesat dan senantiasa diarahkan untuk kepentingan rakyat kecil dengan harapan mereka dapat memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Bahkan Koperasi dianggap sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang mendukung negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan

dan kemakmuran rakyat. Menurut Syarifudin Hasan (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Indonesia), pada tahun 2009, jumlah Koperasi Indonesia yang tercatat adalah sebesar 170.411 unit dan terus berkembang hingga menjadi 200.808 unit Koperasi pada pertengahan tahun 2013 (Arisanti 2014).

Namun demikian, perkembangan jumlah unit Koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun belum diimbangi dengan pertumbuhan kontribusi Koperasi terhadap perekonomian nasional Indonesia. Hal ini terlihat dari penjelasan Deputi Bidang Pernerjaan dan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian Indonesia, Edy P. Irawady, bahwa dengan jumlah unit Koperasi yang mencapai 200.000 unit dan dengan beranggotakan 35 juta orang ini, kontribusi Koperasi Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia baru mencapai kisaran 2% (Sudoyo 2014). Sejauh ini, pelbagai riset dan analisis kritis terhadap isu kendala yang dihadapi oleh Koperasi di Indonesia memang telah banyak dilakukan. Para akademisi dan praktisi berupaya mencari tahu akar permasalahannya demi

mencari solusi terbaik bagi Koperasi di Indonesia. Namun hingga saat ini, hasilnya belum mampu mendongkrak kontribusi Koperasi terhadap perekonomian bangsa, bahkan jumlah unit Koperasi yang tidak aktif menjadi sangat signifikan.

Berdasarkan rekapitulasi data Koperasi per 31 Desember 2013, jumlah Koperasi yang tidak aktif mencapai 60.584 unit dari 203.701 unit Koperasi yang tercatat saat itu. Kemudian per 31 Desember 2014, jumlah unit Koperasi yang tidak aktif mencapai 62.239 unit dari 209.488 unit. Selanjutnya Kemudian per 31 Desember 2015, jumlah unit Koperasi yang tidak aktif mencapai 61.912 unit dari 212.133 unit Koperasi yang terdaftar (www.depkop.go.id).

Jika dihitung berdasarkan data-data tersebut, artinya baik di tahun 2013 maupun di tahun 2014, jumlah unit Koperasi yang tidak aktif mencapai 29,7 % dari total unit Koperasi yang terdaftar pada masing-masing tahun tersebut. Seolah-olah peningkatan jumlah unit Koperasi yang tidak aktif sejalan dengan pertumbuhan jumlah unit Koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Mengingat tantangan yang terus berkembang ini dan

mengingat kondisi perkembangan Koperasi di Indonesia saat ini, maka riset mengenai kendala dan strategi yang berkaitan dengan Koperasi memang perlu dilakukan secara terus-menerus.

Berdasarkan rekapitulasi data Koperasi per 31 Desember 2014 yang disajikan di www.depkop.go.id, Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah unit Koperasi terbanyak adalah Jawa Timur, kemudian disusul dengan provinsi Jawa Tengah sebagai peringkat kedua, dan Jawa Barat sebagai peringkat ketiga. Dilihat dari data unit Koperasi yang tidak aktif pada tahun 2014, jumlah unit Koperasi Jawa Timur yang tidak aktif adalah 3.710 unit dari 30.850 total unit Koperasi di Jawa Timur (12% tidak aktif), kemudian jumlah unit Koperasi Jawa Tengah yang tidak aktif adalah 5.221 unit dari 27.784 unit Koperasi di Jawa Tengah (18,8% tidak aktif). Sedangkan jumlah unit Koperasi Jawa Barat yang tidak aktif mencapai 9.930 unit dari 25.563 unit Koperasi di Jawa Barat (38,8% tidak aktif).

Masalah Penelitian

Dalam pengelolaan koperasi tentunya tidak dapat lepas dari kendala dan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Terdapat 4 (empat) permasalahan utama yang dihadapi oleh Koperasi, yakni sebagai berikut:

- 1) Tingkat partisipasi anggota dalam proses pengembangan kegiatan organisasinya yang masih rendah.
- 2) Kualitas dan kuantitas SDM, akses pasar, akses kelembagaan, akses pembiayaan dan informasi serta penggunaan teknologi tepat guna yang masih minim
- 3) Produk Koperasi memiliki daya saing yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produk impor.
- 4) Tingkat inovasi dan pengembangan produknya masih minim

Disamping mengenai kendala utama Koperasi juga terdapat 2 (dua) strategi yang diharapkan dapat menjadi solusi atas kendalanya, yakni:

- 1) Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi, yang disertai dengan adanya perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi;
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), akses pasar, teknologi,

kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi.

Tujuan Penelitian

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan perkembangan koperasi di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah.
2. Mendeskripsikan dampak dari adanya kegagalan pengelolaan koperasi di Kabupaten Pati.
3. Memastikan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi di kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dapat dihadapi dan diselesaikan setiap koperasi sehingga prosentase koperasi yang dibubarkan semakin kecil.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis penelitian studi kasus. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi parsitipatif, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data yang dilakukan secara terus menerus

dari awal sampai akhir penelitian mulai dari mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian Tentang Faktor Kegagalan Pengelolaan Koperasi, menunjukkan ada 4 Masalah Utama Koperasi. Hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Anggota dalam Pengembangan Kegiatan Usaha Koperasi
Tingkat Partisipasi anggota digambarkan melalui kehadiran rapat, penggunaan jasa Koperasi, rata-rata pertumbuhan Koperasi, minat menjadi pengurus, serta adanya saran dan masukan anggota. Selanjutnya untuk persentase penggunaan jasa Koperasi oleh anggotanya. Adapun rata-rata pertumbuhan Koperasi berkisar antara < 10 % per tahun. Sedangkan tingkat minat anggota untuk menjadi pengurus Koperasi sebanyak 33,8 %. sedangkan 66,2% Koperasi menyatakan anggotanya tidak berminat untuk menjadi pengurus. Kemudian mengenai saran dan masukan

dari setiap anggota pengurus, sejumlah 100 % Koperasi menyatakan terdapat saran dan masukan anggota terhadap pengurus.

2. SDM, Akses Pasar, Penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), Akses Pembiayaan, Informasi dan Kelembagaan.

- 1) Sumber Daya Manusia (Pengurus, Karyawan dan Anggota)

Sumber Daya Manusia yang mengelola Koperasi meliputi pengurus, karyawan dan anggota. Adapun kualitas SDM pengelola Koperasi digambarkan melalui tingkat pendidikan, pelatihan yang diterima, pekerjaan yang sesuai kompetensi serta apakah pengelola Koperasi merupakan pekerjaan sampingan. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan untuk menelaah mengenai tingkat komitmen seseorang terhadap mata pencaharian sampingannya.

- 2) Akses Pasar

Akses pasar akan menilai mengenai apakah Koperasi telah dapat

mengidentifikasi pasar utama dari produk Koperasi. Kemudian menilai apakah Koperasi dapat memperoleh akses untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk pemasaran produknya, serta apakah Koperasi memiliki peluang untuk memasuki gerai usaha retail.

3) Penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Penilaian dalam penggunaan teknologi tepat guna terkait dengan apakah Koperasi tersebut telah terkomputerisasi dalam sistem pencatatannya, terhubung dengan internet dan dimanfaatkan dengan baik serta diawasi penggunaannya sehingga menjadi teknologi tepat guna dalam proses produksi.

4) Akses Pembiayaan

Akses pembiayaan dinilai berdasarkan kemudahan memperoleh pinjaman dari pihak perbankan, BUMN maupun bantuan dari pemerintah.

5) Akses Informasi

Akses informasi terkait dengan informasi yang dimiliki dan dapat diakses oleh seluruh anggota Koperasi.

Terkait hal konsistensi diadakannya rapat tahunan Koperasi, konsistensi dalam penyusunan RABK untuk tahun selanjutnya serta RABK dianalisis dan dievaluasi setiap tahun, saran dan masukan dari anggota Koperasi, mekanisme penyebaran informasi pada anggota, peraturan Koperasi terkini, transparansi laporan keuangan Koperasi, kemudahan informasi dari dunia usaha tentang pemasaran produk Koperasi dan kemudahan informasi dari Pemerintah untuk pengembangan Koperasi.

6) Akses Akuntabilitas & Kelembagaan

Akses akuntabilitas Koperasi terkait dengan pencatatan yang dimiliki oleh Koperasi apakah telah lengkap dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), serta apakah terdapat audit atas laporan keuangan. Terkait akses kelembagaan terkait dengan apakah terdapat struktur organisasi dan yang jelas di dalam Koperasi, apakah terdapat penyertaan pemerintah

dalam kegiatan Koperasi serta apakah terdapat hubungan antara sesama Koperasi dan pemerintah.

3. Daya Saing Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kemampuan daya saing produk Koperasi dinilai dengan kemampuan memenuhi spesialisasi produk, kualitas produk Koperasi dibandingkan produk impor, harga jual produk Koperasi dibandingkan dengan harga jual produk impor, HPP produk Koperasi dihitung sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) serta penyebab harga produk Koperasi lebih tinggi dari produk impor.

4. Inovasi dan Pengembangan Produk.

Terkait dengan inovasi dan pengembangan produk, beberapa responden memberikan masukan agar produk Koperasi dapat bersaing dengan produk impor, antara lain: Koperasi harus bekerjasama dengan produsen agar harganya dapat bersaing dan dipermudah dalam penyaluran produknya, pemerintah harus memperkuat posisi Koperasi dalam perekonomian nasional, sehingga lebih sederhana prosesnya dalam memperoleh pinjaman.

Analisis Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menggambarkan mengenai permasalahan yang dihadapi Koperasi di wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah serta menjawab identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Analisis masalah yang dihadapi oleh Koperasi yang meliputi:

1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan usaha Koperasi.

Tingkat partisipasi anggota digambarkan melalui kehadiran rapat, penggunaan jasa Koperasi, rata-rata pertumbuhan Koperasi, minat menjadi pengurus serta adanya saran dan masukan anggota.

2) Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan teknologi tepat guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan.

Terkait dengan tingkat SDM Koperasi Kabupaten Pati dinilai cukup memadai dari sisi kompetensi. Namun jika dilihat dari tingkat pendidikannya, masih banyak SDM

yang belum mengenyam pendidikan koperasi yang memadai.

- 3) Daya saing produk Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor.

Terkait kemampuan memenuhi spesialisasi produk, sebanyak 79,8% menyatakan kesulitan dalam memenuhi spesialisasi produk, selanjutnya sebanyak 72,6 % responden menyatakan kualitas produk Koperasi lebih rendah dari kualitas produk impor, sedangkan 75,2% responden menyatakan harga produk Koperasi lebih tinggi harganya dari produk impor. Beberapa alasan harga produk Koperasi lebih tinggi dari produk impor berdasarkan survei, yaitu terdapat responden yang menyatakan harga dari produsen atau supliernya sudah mahal, sehingga ketika Koperasi menjual hasil produksinya harga menjadi tinggi, serta sejumlah 60% responden menyatakan HPP produk Koperasi telah dihitung sesuai dengan

Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

- 4) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk.

Terkait dengan inovasi dan pengembangan produk, pengurus Koperasi berharap dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha (produsen) dan pemerintah, agar Koperasi dapat memperoleh bantuan pinjaman dari pihak luar (Bank, BUMN dan Pemerintah).

2. Apakah terdapat masalah lain yang secara spesifik menjadi masalah utama yang saat ini dihadapi oleh Koperasi?

Berdasarkan hasil survei peneliti, permasalahan lain yang mungkin muncul di Koperasi Kabupaten Pati adalah mulai berkurangnya jumlah Koperasi yang aktif. Sebab berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Koperasi Kabupaten Pati. Permasalahan lain yang dihadapi Koperasi Kabupaten Pati adalah mulai berkurangnya jumlah koperasi yang aktif. Sebab berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Dinas Koperasi Kabupaten Pati sebanyak 48,03 %

koperasi tidak aktif, 21,68% koperasi tidak terkelola secara baik/regular dan hanya 29,38 % koperasi yang aktif / dikelola dengan baik, sampai dengan data penelitian ini disusun. Terkait situasi ini, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, kami berasumsi bahwa:

- 1) Situasi ini terjadi dilatarbelakangi bahwa pengelola koperasi memiliki pekerjaan lain diluar koperasi, yaitu sebanyak 82 % pengurus dan karyawan koperasi menyatakan memiliki pekerjaan lain disamping pengurus dan karyawan koperasi. Sedangkan sisanya sebanyak 18 % menyatakan tidak memiliki pekerjaan lain diluar koperasi. Hal ini dikhawatirkan dari sisi komitmen dan fokus SDM Koperasi terhadap organisasinya.
- 2) Awal pendirian Koperasi hanya ingin mendapatkan insentif atau kucuran dana dari pemerintah sesuai peraturan menteri koperasi nomer: 01/Per/M.KUKMII/2010.
3. Data tahun 2016 jumlah koperasi di Kabupaten Pati 1.130 unit, jumlah koperasi yang aktif 577 Unit, jumlah

koperasi tidak aktif 553 unit. Data tahun 2017 jumlah koperasi di Kabupaten Pati 1.143 unit, jumlah koperasi yang aktif 594 Unit, jumlah koperasi tidak aktif 549 unit. Pada tahun 2016 telah diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk pembubaran koperasi di Kabupaten Pati ke Kementrian Koperasi dan UMKM dan baru disetujui pembubarannya dengan SK Menteri Koperasi dan UMKMpada tahun 2018 sejumlah 527 Unit (46,11%) koperasi dibubarkan. (*sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati*).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perkembangan koperasi di Kabupaten Pati, Data tahun 2016 jumlah koperasi di Kabupaten Pati 1.130 unit, jumlah koperasi yang aktif 577 Unit, jumlah koperasi tidak aktif 553 unit. Data tahun 2017 jumlah koperasi di Kabupaten Pati 1.143 unit, jumlah koperasi yang aktif

- 594 Unit, jumlah koperasi tidak aktif 549 unit. Dari data tersebut penambahan jumlah koperasi tahun 2016 – 2017 sejumlah 13 koperasi baru (1,15%). Koperasi di Kabupaten Pati tahun 2017 sejumlah 1.143 koperasi, yang aktif sejumlah 594 koperasi (51,97%), yang tidak aktif 549 koperasi (48,03%), 21,68% koperasi tidak terkelola secara baik/regular dan hanya 29,38 % koperasi yang aktif / dikelola dengan baik
- 2) Konsekwensi dari kegagalan pengelolaan koperasi di Kabupaten Pati, beberapa koperasi yang dibubarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Pati telah dilaksanakan pembubaran oleh Dinas Koperasi dan UMKM beberapa koperasi. Pada tahun 2016 telah diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk pembubaran koperasi di Kabupaten Pati ke Kementerian Koperasi dan UMKM dan baru disetujui pembubarannya dengan SK Menteri Koperasi dan UMKM pada tahun 2018 sejumlah 527 Unit koperasi dibubarkan. Bahkan di beberapa kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah telah terjadi pembubaran koperasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
 - 3) Pengelolaan koperasi di Kabupaten Pati;
 - (1) Sebagian berjalan dengan baik dan lancar, koperasi yang aktif / dikelola dengan baik 29,38 %. Hal ini hasil bimbingan dan arahan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati selaku pembina koperasi telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan pengelolaan koperasi.
 - (2) Sebagian lagi berjalan dengan tidak baik dan tidak lancar, koperasi tidak terkelola secara baik/regular 21,68%. Hal ini dampak dari adanya pengelolaan koperasi yang tidak professional dan awal pendirian koperasi hanya untuk mendapatkan insentif/bantuan dana dari pemerintah.
- Saran**
1. Untuk Koperasi
 - 1) Mengingat 70% Koperasi belum memberikan pelatihan terhadap

pengurus Koperasi selaku SDM mereka, maka disarankan mereka mulai memberikan pelatihan secara berkesinambungan demi meningkatkan kualitas SDM baik dari sisi teknis maupun dari sisi pemahamannya terhadap Koperasi.

- 2) Pemerintah dapat terus menaikkan standar minimal wajib kepada masyarakat sehingga mereka yang terlibat sebagai penggerak ekonomi dapat memiliki kualitas dan pengetahuan yang memadai, termasuk mereka yang terlibat dalam usaha Koperasi.
- 3) Mengenai daya saing produk Koperasi yang masih lemah jika dibandingkan dengan produk impor, sebaiknya diadakan kerjasama antar koperasi untuk menghimpun dana yang lebih besar demi memperoleh harga pokok yang lebih bersaing. Disisi lain, proses *benchmarking* dapat saja menjadi usulan bagi mereka sehingga mereka

dapat mempelajari praktik pengelolaan dan produksi yang lebih baik dan lebih efisien dari pelbagai industri pesaing khususnya industri di luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah dapat membantu memberikan dukungan dana untuk proses pembelajarannya.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu belum mendapatkan informasi yang memadai untuk memperoleh gambaran permasalahan koperasi di wilayah Kabupaten Pati. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, agar melaksanakan penelitian dengan metode kuantitatif dengan jumlah responden yang memadai, serta mencoba untuk melakukan survey yang lebih luas wilayahnya, agar hasil penelitian selanjutnya dapat memperoleh gambaran permasalahan koperasi yang lebih reliabel dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hatta, Mohammad. 1947. *Penunjuk Bagi Rakjat Dalam Hal Ekonomi: Teori dan Praktek*. Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakjat, Jakarta.

2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2013. Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi per 31 Desember 2013, <http://depkop.go.id>.
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2014. Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi per 31 Desember 2014, <http://depkop.go.id>.
4. Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia.
5. Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerKoperasian, Jakarta.
6. Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian, Jakarta.
7. Team Universitas Gajah Mada. 1984. Koperasi Sebuah Pengantar, Jakarta, Departemen Koperasi
8. Sartika, Partomo Tiktik. 2009. Ekonomi Koperasi. Ghalia Indonesia. Jakarta.
9. Widiyanti, Ninik. 1994. Manajemen Koperasi. PT. Renerka Cipta. Jakarta.
10. Basrowi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.